

# BULETIN BPKSDM

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM



**5** PALEMBANG SISI SEJARAHNYA  
YANG MENAWAN

**8** MERENTANG JALAN  
MENABUR CAHAYA DI BUMI PAPUA

**EDISI 6**

ISSN 1907-0136  
9 771907 013646

**Pembina/Pelindung :**  
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia,

**Penanggung jawab :**  
Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia,

**Wakil Penanggung Jawab :**  
Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi,  
Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi,  
Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi,  
Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi,

**Pemimpin Redaksi :**  
Surtiningsih,

**Redaksi Pelaksana :**  
Nanan Abidin,

**Anggota Redaksi :**  
Djoko Prakosa  
Doedoeng Z. Arifin,  
Bambang Soekaryanto,  
Eddy Sunyoto,  
Sari Mustika,  
Yaya Supriyatana,  
Ero,  
Cakra Nagara,  
Kristina Pratiwi Hadi,  
Maria Ulfah,  
Yosaphat Bisma W.

**Administrasi dan Distribusi :**  
Sugeng Sunyoto,  
Sri Yuliawati,  
Agus Firngadi,  
Agus Kurniawan,  
Ahmad Suyaman,  
Rusmini Wati

**Desain/Tata Letak :**  
Nanang Supriyadi

**Photografer :**  
Sri Bagus Herutomo

K Tahun 2009 akan berlalu, tahun 2010 segera menjelang. Yang telah berlalu akan menjadi kenangan, sedangkan harapan-harapan baru kan membayang di hadapan untuk menunggu akan dibawa kemana gerangan.

Tiada terasa Buletin BPKSDM telah setahun mempersembahkan kepada khalayak informasi-informasi terkait perkembangan dunia jasa konstruksi di Indonesia. Dalam perjalanan tersebut tak jarang aral dan halangan melintang, menghalangi pandangan dan langkah untuk terus maju ke depan.

Tidak hanya itu, tak jarang pun kesalahan dilakukan untuk mencapai kesempurnaan yang tentunya tidak akan pernah tercapai. Pada kesempatan ini dimana tahun telah berganti ada baiknya bila kami berintrospeksi akan kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Semoga terbitan buletin BPKSDM yang terakhir di tahun 2009 ini memberi pencerahan dan semangat bagi setiap denyut nadi pelaku jasa konstruksi Indonesia. Jika pun ada yang kurang berkenan semoga hal itu akan dimaklumi adanya. Kami ucapkan.... :

SELAMAT MEMBARA

## Meretas harapan Pasca Gempa Sumatera Barat



Dokumentasi Gempa Sumbar

Gempa bumi yang melanda Sumatera Barat dan sekitarnya pada akhir September lalu selain mengakibatkan korban jiwa juga kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Khusus untuk kerusakan infrastruktur dampak yang ditimbulkan tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik semata, tapi lebih dari itu akan berdampak luas mengingat infrastruktur mencakup kebutuhan transportasi, komunikasi, hingga perekonomian.



Dokumentasi Gempa Sumbar

Besarnya dampak tersebut dapat kita lihat dari data kerusakan akibat gempa bumi di Sumatera Barat beberapa waktu ( data Badan Kesbang, Politik, dan Linmas Selaku Sekretaris selaku Sekretaris Satkorlak Penanggulangan Bencana Sumatera Barat per 30 Oktober 2009). Sejumlah 119.005 Rumah penduduk rusak berat, 2114 sarana pendidikan hancur, 88 sarana kesehatan rusak parah, serta 246 kantor pemerintahan tidak berfungsi.

Sementara itu 170 jaringan jalan rusak berat, 15 jembatan putus, 88 jaringan dan saluran irigasi rusak parah, serta sejumlah 1331 rumah ibadah porak poranda. Praktis kerusakan yang terjadi di Provinsi dengan 19 kabupaten dan kota ini mencapai lebih dari 5 Triliun rupiah. Belum ditambah dengan kerugian yang tidak mungkin tergantikan, seperti korban jiwa yang mencapai lebih dari 1200 jiwa, sementara itu lebih dari 6500 jiwa mengungsi.

Dari gambaran tersebut, bisa dibayangkan betapa sulitnya hidup yang akan dijalani masyarakat Sumatera Barat. Lepas dari bahaya langsung menghadapi sulitnya akses yang selama ini menunjang hidup mereka. Belum lagi yang dirundung

kesedihan akibat kehilangan salah satu atau mungkin seluruh sanak saudaranya. Dari kondisi ini perlu



Interview Kepala BPKSDM dengan TVRI



Kepala BPKSDM di Sumbar

Gedung (fasilitasi/pendampingan).

Disini Mandor juga perlu dilatih mengingat perannya sebagai adalah tulang punggung pembangunan konstruksi, sekaligus perannya yang bisa berfungsi ganda yaitu sebagai Job Seeker (Pencari Kerja bagi para tukang), Pengawas bagi para tukang, serta guru bagi para tukang.

Sumaryanto Widayatin juga melihat bahwa kecepatan pemulihan infrastruktur dalam masa Rekonstruksi dan Rehabilitasi, juga sangat ditentukan oleh sikap/perilaku masyarakat dengan didampingi Fasilitator/Pendampingan yang akan kita bina sekarang ini. Mencontoh Yogyakarta, yang terlebih dahulu terkena bencana, ternyata dengan

cepat masyarakatnya dapat membangun kembali dengan pola Fasilitasi/Pendampingan. Kita berharap demikian pula dengan Sumatra Barat.



Interview Kepala BPKSDM

# PALEMBANG

## SISI SEJARAHNYA YANG MENAWAN



Gedung Dempo di Gelora Sriwijaya Jaka Baring Palembang



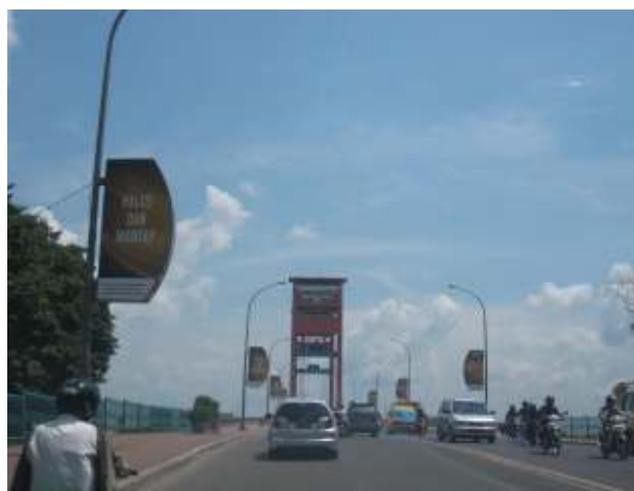
Jembatan Sungai Musi

**Kota Palembang** adalah salah satu kota besar di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya sebelum kemudian berpindah ke Jambi.

Palembang merupakan kota tertua di Indonesia, hal ini didasarkan pada prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang, sebelah barat Kota Palembang, yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota yang merupakan ibukota Kerajaan Sriwijaya pada tanggal 17 Juni 683 Masehi. Maka tanggal tersebut dijadikan patokan hari lahir Kota Palembang.

Secara geografis, Palembang terletak pada  $2^{\circ}59'27.99''\text{LS}$   $104^{\circ}45'24.24''\text{BT}$ . Luas wilayah Kota Palembang adalah  $102,47 \text{ Km}^2$  dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak Kota Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalur jalan Lintas Pulau Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera.

Sungai Musi, menjadi bagian yang sangat penting di Palembang. -- yang dilintasi oleh Jembatan Ampera -- yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah dan merupakan Kota Air yang terdiri dari 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Selain Sungai Musi, dapat kita temui kekayaan alam lain seperti Hutan Wisata Pundi Kayu, Kambang Iwak Family Park,



Lulu - lintas kota Palembang

Kawah Tengkuerep, dam Sungai Gerong.

Memang Kota Palembang telah dicanangkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai 'Kota Wisata Air' pada tanggal 27 September 2005. Presiden mengungkapkan bahwa Kota Palembang dapat dijadikan kota wisata air seperti Kota Bangkok di Thailand dan Kota Pnomh Phenh di Kamboja. Tahun 2008 Kota Palembang menyambut kunjungan wisata dengan nama "Visit Musi 2008".

**Tidak salah jika Palembang menjadi kota unggulan mengingat potensi wisata di Provinsi yang memiliki 15 Kabupaten/Kota sangat besar. Dan dari potensi wisata tersebut tidak sedikit yang berupa cipta rasa karsa atau budaya manusia, produk-produk konstruksi dari pendahulu bangsa ini, selain memang kaya dengan potensi wisata alamnya.**



Lokasi Gelanggang Olah Raga Palembang



Pasar 16 Ilir Palembang

**Produk budaya yang dapat kita jumpai di Palembang yang terkenal dari antara lain** Jembatan Ampera, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Benteng Kuto Besak, Kantor Ledeng (sekarang Gedung Kantor Walikota), Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Taman Purbakala Bukit Siguntang, Monumen Perjuangan Rakyat, Museum Balaputradewa, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, dan Masjid Cheng-Ho Sriwijaya.

Hal itu menunjukkan bahwa produk-produk kecanggihan arsitek-arsitek dan insinyur-insinyur bangsa yang terdapat di Kota yang terkenal dengan makanan empek-empek ini tidak kalah dengan produk daerah lain bahkan mungkin diakui pula di luar negeri. Kekayaan budaya juga dapat kita lihat pada Rumah Adat Palembang adalah Rumah Limas dan Rumah Rakit.

Dalam hal produk konstruksi modern pun Palembang terus membangun. Beberapa bangunan baru dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang dapat kita temui di Palembang antara lain Stadion Gelora Sriwijaya dibangun dalam rangka penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVI di tahun 2004. Bentuk dari stadion diilhami dari bentuk layar perahu terkembang dan diberi nama berdasarkan keadikuasaan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang di masa lampau.

Stadion ini pernah menggelar 2 pertandingan dalam lanjutan Piala Asia AFC 2007, yaitu babak penyisihan grup D antara Arab Saudi dan Bahrain serta perebutan tempat ke-tiga antara Korea Selatan dengan Jepang. Selain itu, stadion ini merupakan basecamp bagi klub sepak bola Palembang, Sriwijaya Football Club Sriwijaya FC yang merupakan klub sepak bola kebanggaan masyarakat Palembang.



Lokasi Gelora Sriwijaya Jaka Baring Palembang

Selain itu Palembang memiliki sebuah Bandara Internasional yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II). Bandara ini terletak di barat laut Palembang, melayani baik penerbangan domestik maupun internasional (sejak runway di perpanjang). Bandara ini juga menjadi embarkasi haji bagi warga Sumatera Selatan. Penerbangan domestik melayani jalur Palembang ke Jakarta, Bandung, Batam, Pangkal Pinang dan kota-kota lainnya, penerbangan internasional melayani Singapura, Kuala Lumpur, Malaka, China, Thailand.

Tidak kalah dengan kota-kota di Pulau Jawa, Palembang mempunyai jalan tol Kayu Agung-Palembang-Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II jalan tol ini mempercepat akses ke bandara dan Kayu Agung.

Palembang juga memiliki tiga pelabuhan utama yaitu



Panorama Kota Palembang

Boom Baru, Pelabuhan 36 Ilir, dan Pelabuhan Tanjung Api Api. Ketiga pelabuhan ini melayani pengangkutan penumpang menggunakan ferry ke Muntok (Bangka) dan Batam. Saat ini sedang dibangun pelabuhan Tanjung Api-api yang melayani pengangkutan penumpang dan barang masuk dan keluar Sumatera Selatan.

Patut dibanggakan pula, sebab dalam ajang Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia Tahun 2006, salah karya anak bangsa yang ada di Palembang, yaitu Hotel Novotel Palembang yang menerima penghargaan terbaik dalam kategori Teknik Arsitektur. Karya PT. Duta Cermat Mandiri tersebut memiliki keunggulan antara lain menerapkan prinsip arsitek tropis hemat energy, mendayagunakan bahan alami lokal, khususnya batu alami lokal, menerapkan prinsip arsitek tropis hemat energy, mendayagunakan bahan bangunan alami lokal khususnya batu alam, efisien biaya pemeliharaan melalui upaya daur ulang, serta menerapkan daur ulang air kamar mandi untuk penyiraman taman hotel yang juga merupakan taman kota. **TW**



Masjid Baitil Atiq Di Taman Talang Semut Palembang



Monumen Perjuangan Rakyat Palembang

# MERENTANG JALAN, MENABUR CAHAYA DI BUMI PAPUA

Kali ini perjalanan Profil Balai akan singgah ke Provinsi paling timur Indonesia yaitu Balai Peningkatan Keahlian Teknik Konstruksi ke-PU-an di Papua. Balai ini secara resmi berdiri pada Tahun 2001 yang saat ini dikepalai oleh Damaris Paruntung, SE. Saat ini jumlah pegawai yang memperkuat Balai sebanyak 13 orang terdiri dari tujuh orang PNS dan enam orang pegawai harian proyek.

Pada tahun 2009 ini, jumlah karya siswa 'hanya' 11 orang, dengan jumlah karya siswa on going sebanyak 24 orang. Sedangkan keseluruhan alumni yang dihasilkan sebanyak 124 orang.

Program Pendidikan yang ditawarkan pada Balai ini antara lain D3, D4 dan Magister (S2) untuk para pegawai/ tenaga kerja bidang ke-PU-an. Program ini ditawarkan mengingat di Papua terdapat 40 kabupaten/kotamadya yang membutuhkan peningkatan sumber daya manusia, terutama di bidang ke-PU-an.

Sementara itu, Pelatihan Keahlian Konstruksi dilakukan untuk bidang antara lain jalan dan jembatan, pengairan, cipta karya, tata ruang, serta manajemen.



Pelaksanaan Seleksi Didik

Tenaga Pengajar Balai Peningkatan Keahlian Teknik Konstruksi ke-PU-an berasal dari Dosen Perguruan Tinggi Negeri Mitra, dan Dosen Praktisi dari dinas PU terkait.

Selama ini kiprah Balai yang beralamat di bukan tanpa masalah. Masih dirasakan dukungan Pemerintah Setempat yang sangat kecil. Belum lagi kendala dalam pendidikan yang karena sarana dan prasarannya kurang, seperti tidak adanya asrama maka banyak karya siswa yang tidak lanjut.

Keadaan tersebut masih diperparah karena dalam pembiayaan operasional (biaya hidup), seringkali kurang ada kepedulian dari instansi pengutusannya. Dan tidak boleh dilupakan, bahwa sangat umum kendala geografis di Papua cukup menghalangi mobilisasi dari daerah satu ke daerah lain. Apalagi untuk mencapai daerah-daerah/kabupaten pemekaran

Tak jarang untuk mencapai suatu daerah harus menggunakan pesawat udara, yang jadwal penerbangan itu pun terganggu faktor alam, sehingga dapat berminggu-minggu baru diadakan hubungan ke tempat tugas kembali.



Pembekalan Sertifikasi Keahlian



Sosialisasi Penawaran Beasiswa

Bahkan bila ada penawaran program melalui surat, terkadang berbulan-bulan baru sampai.

Hambatan-hambatan tersebut mungkin yang menjadi penghalang proses kemajuan pendidikan bidang ke-PU-an di Papua yang diupayakan oleh Balai Peningkatan Keahlian Teknik Konstruksi ke-PU-an di Papua. Meski demikian, bukan berarti berhenti untuk terus melangkah. Langkah-langkah untuk menghadapi semua persoalan tersebut tetap dilakukan antara lain tetap mensosialisasikan melalui surat, radio dan koran lokal. Dan jika mengirimkan informasi langsung ke tempat/kabupaten/pemekaran.

Di samping itu kerjasama yang baik dengan balai-balai terkait yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Balai Peningkatan Keahlian Teknik Konstruksi ke-PU-an di Papua mengharapkan adanya kepedulian dengan penyesuaian perbedaan kemahalan biaya di daerah dan pusat. Akan sangat bijaksana jika segala sesuatu yang terkait kelancaran operasional disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Mengenai kesesuaian kebijakan antara Balai dan pemerintah daerah, dirasakan perlu dilakukan pembicaraan langsung antara Pejabat Pusat dengan Gubernur dan Bupati mengenai peningkatan SDM Pemerintah Daerah, supaya ada kepedulian daerah dengan program pendidikan yang ditawarkan.

Tidaklah mudah merentang jalan menabur cahaya, tapi lebih berat lagi menyesatkan diri dalam gelap tanpa tau hendak kemana. Semoga langkah Balai-balai BPKSDM di daerah mampu mendorong sumber daya manusia merentang jalan bertaburkan cahaya dalam pendidikan infrastruktur. **TW**



Kegiatan CPD Karyasiswa



Pelatihan Teknik Pembelajaran Orang Dewasa



Pelatihan Teknik Konstruksi

## Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi Dalam Kontribusinya dalam Pengadaan Barang / Jasa di DAERAH



Proyek Konstruksi Lepas Pantai

Bagian dari tugas dan fungsi Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah menyusun kajian Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), sosialisasi dan diseminasi produk produk NSPK, bantuan teknis tentang pengadaan barang/jasa serta melakukan evaluasi terhadap usulan penetapan pemenang lelang dengan nilai diatas Rp.50 milyar dan analisis terhadap substansi sanggahan banding yang ditujukan kepada Menteri PU.

Sebagai bagian dari institusi pemerintah di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, keberadaan Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi (Pusbin PK), cukup memberikan andil terhadap peningkatan kompetensi pengadaan barang/jasa di beberapa daerah.

Banyak hal telah dikemukakan oleh beberapa pejabat pemerintah daerah termasuk di antaranya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang datang untuk berkonsultasi/diskusi menyangkut tentang penyelenggaraan konstruksi dan pengadaan

barang/jasa pemerintah yang dananya bersumber dari APBD.

Dalam diskusi/ konsultasi tersebut dibahas antara lain tentang: prosedur pengadaan jasa konstruksi dengan kontrak tahun jamak terkait dengan pengalokasian dana anggaran pemerintah daerah, prosedur perubahan kontrak pada jenis kontrak lumpsum dan kontrak harga satuan untuk jasa pemborongan, pengertian tentang penunjukan langsung untuk pekerjaan lanjutan seperti yang dimaksud pada pasal 12, ayat (1) PP no.29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, prosedur perubahan kontrak jasa konsultasi untuk pekerjaan pengawasan konstruksi/ supervisi, prosedur pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola, dsb.

Walaupun tugas utamanya adalah melakukan pembinaan penyelenggaraan konstruksi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, namun keberadaannya dibutuhkan oleh banyak pihak terutama pengguna jasa, sebagai salah satu tempat untuk melakukan sharing /tukar pikiran menyangkut tentang penyelenggaraan konstruksi di daerahnya. Dalam pertemuan konsultasi, oleh Pusbin PK disampaikan pandangan tentang pemahaman dalam penerapan peraturan perundang undangan yang berlaku pada proses pengadaan barang/ jasa serta dampak permasalahan yang dapat ditimbulkan akibat kesalahan dalam menerapkan peraturan perundang undangan tersebut.

Bertolak dari pengalaman pada forum diskusi dalam rangka bantuan teknis pengadaan barang/jasa di beberapa daerah, perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang teknis penyampaian materi bahasan, antara lain: waktu penyelenggaraan yang cukup sesuai kebutuhan dan jumlah materi bahasan yang perlu disampaikan; penekanan pada hal hal yang bersifat

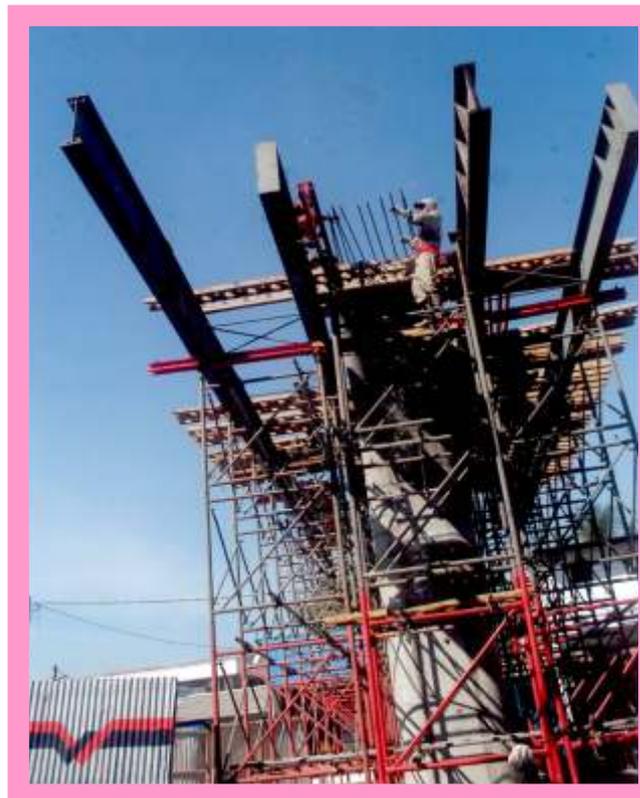
rentan terhadap timbulnya permasalahan dalam proses pengadaan barang/ jasa; contoh substansi permasalahan yang sering muncul dalam surat sanggahan atau sanggahan banding; contoh konkrit dalam melakukan penilaian kualifikasi dan evaluasi terhadap dokumen penawaran serta contoh penyusunan dokumen pemilihan dan dokumen kontrak.

Pertimbangan teknis dalam penyampaian materi tersebut perlu diingatkan, karena bantuan teknis tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diberikan oleh Pusbin PK, mempunyai 2 (dua) sasaran bagi pengguna jasa, yaitu : 1).Pembekalan untuk persiapan dalam menghadapi ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah bagi calon panitia maupun PPK, sehingga dalam penyampaian materi bahasan cenderung lebih ditekankan pada pembahasan contoh-contoh soal yang sering keluar dalam ujian; 2).

Pencerahan/pendalaman materi terutama bagi panitia (yang sudah bersertifikat ahli pengadaan) tentang penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada proses pengadaan barang/ jasa dan permasalahannya seperti pada contoh kasus diatas. Penekanan pada sasaran yang kedua dimaksudkan agar panitia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan proses pengadaan lebih lancar tepat sesuai waktu yang direncanakan.

Dalam diskusi pencerahan perlu diingatkan seperti tersebut pada pasal 2, ayat (2) Keppres no.80 tahun 2003, bahwa tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden tersebut adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari dana APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Contoh lain yang perlu disampaikan dalam diskusi



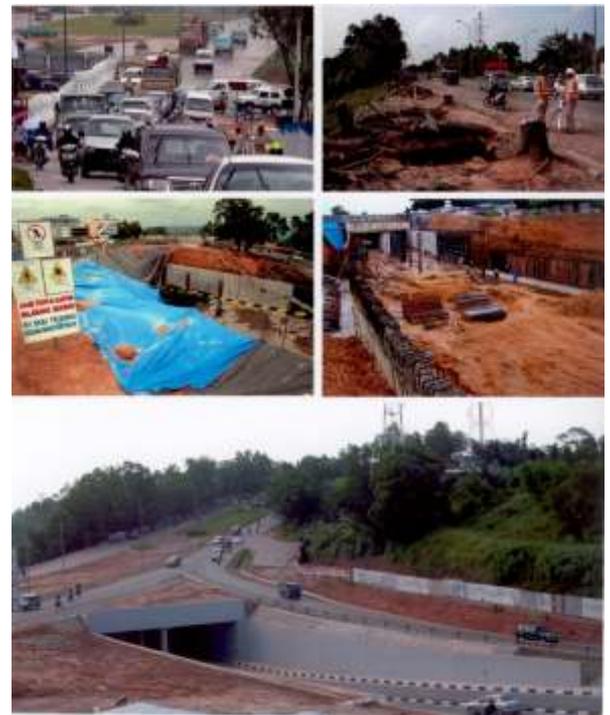
Pekerjaan Konstruksi Jalan Layang

pencerahan adalah seperti tersebut pada pasal 16 Keppres no 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, bahwa dalam menentukan system pengadaan yang meliputi metoda pemilihan penyedia barang/ jasa, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak, perlu mempertimbangkan terhadap jenis, sifat dan nilai barang/ jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/ jasa yang ada.

Contoh kecil penerapan pasal tersebut adalah dalam hal menetapkan jenis kontrak pada proses pengadaan barang/ jasa; Di mana sistem kontrak lumpsum lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan pemborongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/ jenis pekerjaan, sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya, sedang harga yang mengikat dalam kontrak lump sum adalah total penawaran harga.



Pekerjaan Konstruksi Jalan Layang



Pekerjaan Konstruksi Under Pass

Dan sebaliknya, dalam hal perencanaan detail untuk pekerjaan pemborongan termasuk gambar desain, masih belum dilakukan secara mendalam/rinci, karena membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang lebih besar, sehingga volume untuk masing masing unsur/ jenis pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, masih bersifat perkiraan sementara dan cara pembayarannya ditentukan berdasarkan hasil pengukuran bersama terhadap pekerjaan yang betul betul telah dikerjakan oleh penyedia jasa, maka dalam hal menentukan jenis kontrak, dapat dipilih menggunakan kontrak harga satuan yang memungkinkan untuk dilakukan perubahan kontrak maupun perubahan desain sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.

Akibat dari kurangnya pemahaman seperti tersebut, akan dapat menimbulkan masalah apabila terbukti adanya ketidak sesuaian dalam hal: penetapan jenis kontrak, metoda evaluasi penawaran ataupun ketentuan lainnya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk dalam tahap penyusunan dokumen pemilihan.

Contoh lain yang sering disampaikan dalam forum diskusi adalah karena system pengalokasian anggaran daerah, maka waktu yang dibutuhkan untuk

pengesahan dokumen anggaran relatif lebih lama. Dengan demikian, sisa waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam tahun anggaran yang sama terlalu pendek/sempit sehingga risiko untuk tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan cukup besar.

Dalam kondisi seperti tersebut, alternatif yang dapat dilakukan antara lain adalah :

Pertama, merencanakan jadwal pemilihan penyedia barang/ jasa termasuk dalam penyiapan dokumen pemilihan, dilakukan lebih awal sebelum dokumen anggaran disahkan dengan ketentuan antara lain : anggaran biaya untuk kebutuhan pengumuman yang harus dimuat dalam koran dan biaya penggandaan dokumen pemilihan termasuk biaya untuk honorarium panitia pengadaan telah tersedia cukup; PPK/PPTK ataupun KPA dilarang melakukan perikatan/perjanjian ataupun penunjukan penyedia barang/ jasa sebagai pemenang lelang, sebelum dokumen anggaran disahkan oleh yang berwenang menetapkan dokumen anggaran;

Kedua, dalam hal pekerjaan yang akan dilelangkan tersebut merupakan prioritas program yang harus segera dilaksanakan karena faktor kemanfaatan terutama untuk kepentingan masyarakat dan pekerjaan tersebut diindikasikan membutuhkan waktu



Pekerjaan Konstruksi Jalan Layang

penyelesaian lebih dari 1 (satu) tahun anggaran serta untuk dapat mengikat terhadap ketersediaan/pengalokasian anggaran yang dibutuhkan sampai dengan proyek selesai, maka dapat dilakukan dengan mengusulkan kepada pejabat yang berwenang, untuk mendapatkan ijin tertulis menggunakan jenis kontrak tahun jamak (multi years contract).

Permen PU No.43/PRT/M/2007.

Permen PU No.43/PRT/M/2007 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi diterbitkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dengan tujuan untuk memberikan standar dan pedoman yang lebih operasional dan efektif. Sedang ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri tersebut adalah : pengadaan jasa pemborongan/jasa konsultasi yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari dana APBN ataupun dari dana PHLN selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemberi PHLN yang bersangkutan.

Dalam hal akan digunakan untuk mengatur pengadaan jasa pemborongan atau jasa konsultasi yang dibiayai dari dana APBD dapat dilakukan penyesuaian menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai produk hukum untuk kepentingan publik yang bermanfaat bagi para pelaku konstruksi, maka peraturan menteri tersebut harus dapat diakses secara mudah dan murah oleh siapapun yang memerlukan. Dalam hal ini peraturan tersebut dapat diakses melalui internet pada website Departemen PU dengan alamat : <http://www.pu.go.id>

Mengingat Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum dalam kontribusinya terhadap peningkatan kompetensi pengadaan barang/jasa di daerah dinilai cukup besar serta berkembangannya permasalahan yang menurut anggapan sementara pihak sebagai wujud dinamika dalam proses pengadaan barang/jasa, maka perlu dipertimbangkan untuk menyiapkan generasi baru yang berprestasi agar dapat menjawab tantangan seperti tersebut. Dengan harapan semoga peran Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum terhadap kemajuan penyelenggaraan konstruksi dan kontribusinya terhadap peningkatan kompetensi pengadaan barang/jasa di daerah semakin meningkat.

Semoga !!!! goes djoko



# ECO MOBILITY

Oleh : Eddy Sunyoto



Dokumentasi Ecomobility

Sekitar empat tahun yang lalu, teman dan *mungsu* *sinarawedi* saya, orang yang paling *jail* se PU, bilang: "Biasanya orang jelek suka nyari perhatian, kayak kamu yang ke kantor saja pake naik sepeda. Bla,bla,bla". Begitu komentar pertama yang saya terima di awal-awal saya memakai sepeda listrik untuk pergi ke kantor. Wah, ini merupakan 'tantangan' bagi saya untuk membuktikan bahwa saya tidak cari perhatian, sensasi atau bahkan *happening art*.

Pertimbangan saya waktu itu adalah benar-benar rasional: dari segi waktu tempuh, biaya transportasi dan bila mau olah raga tinggal pilih '*mode*' *pancal*. Begitulah kira-kira pertimbangan awal yang melulu untuk kepentingan pribadi.

Ternyata sekarang, langkah pilihan saya tersebut memang sangat sejalan dengan dambaan sebagian penduduk dunia saat ini. Namanya **eco mobility**!

Seiring dengan semakin menurunnya kualitas udara akibat pencemaran sehingga mengakibatkan berbagai hal seperti: efek rumah kaca, pencairan es di kutub, perubahan iklim global dan seterusnya maka penduduk dunia semakin disadarkan perlunya perubahan perilaku agar dapat tinggal di bumi ini dengan nyaman. Sehat dan sejahtera.

Tak kurang dari organisasi pada tingkat dunia seperti Perserikatan Bangsa-bangsa melakukan berbagai upaya untuk mendorong penduduk bumi ini agar hidup dengan lebih ramah terhadap lingkungan dan menjaga kelestariannya. Dihimbau agar semua manusia dapat mengurangi konsumsi dan pembakaran fosil yang namanya minyak sehingga dapat mengurangi emisi karbon sebagai biangnya pencemaran udara. Menjaga keberadaan hutan sehingga mampu menjadi paru-paru dunia untuk menetralkan polusi udara.

Untuk itulah diantaranya, pada bulan Desember 2007

yang lalu di Pulau Dewata diselenggarakan Konferensi Perubahan Iklim Dunia yang diselenggarakan oleh PBB. Sebagai jawaban langsung terhadap keinginan bersama tersebut, banyak organisasi kemasyarakatan baik yang swadaya maupun juga di *back-up* oleh pemerintah, seolah berlomba untuk ikut berperan serta dalam upaya *go green*. Salah satunya adalah melalui gerakan **eco mobility**.

Gerakan ini sendiri digagas oleh Konrad Otto-Zimmermann, Sekretaris Jenderal dari ICLEI-Local Governments for Sustainability, dimana pada salah satu *event* United Nations Climate Change Conference di Bali telah dicanangkan Aliansi Global untuk gerakan *ecomobility*.

Apa *sih* *eco mobility*?

*Ecomobility* adalah merupakan kegiatan transportasi yang tidak menggunakan kendaraan/mobil pribadi. Bisa menggunakan angkutan umum dan yang paling dianjurkan untuk menggunakan kendaraan tanpa bahan bakar minyak seperti: sepeda, sepatu roda, sepeda listrik, dsb ataupun jalan kaki. Dengan tidak menggunakan mobil pribadi, diharapkan akan sangat mengurangi emisi gas buang yang sangat tidak kita inginkan.

Gerakan ini sudah mempunyai banyak anggota dari berbagai lembaga, institusi, ahli, pebisnis, perusahaan dan asosiasi dari berbagai kawasan di belahan dunia ini. Tak terkecuali juga dari Indonesia, seperti komunitas *bike to work* di Jakarta, *Sego Segawe* (Sepeda kanggo sekolah lan nyambut gawe) di Yogya, dan berbagai klub *onthel* atau *gowes* di beberapa kota.

Kembali ke awal tulisan ini, bahwa setelah hampir 4 tahun saya menjalani kegiatan *eco mobility*, saya dapat memberikan kesaksian bahwa sesungguhnya bersepeda ke kantor di Jakarta masih sangat mungkin.



Dokumentasi Ecomobility



Dokumentasi Ecomobility

Meskipun memang harus disertai dengan satu syarat yaitu keberanian. Bukan berani untuk diserempet metro mini yang ugal-ugalan, tetapi keberanian untuk mengalahkan rasa rendah diri, *minderwaardig*. Lha, bagaimana tidak minder *wong* teman-temannya atau adik-adik staf saja sudah pada naik mobil, mosok yang sudah menjabat malah *ngepit*.

Ada juga yang berkomentar: "Wah, ntar gue bisa dimarahin Bagian Umum, pan udeh dikasih mobil dines. Bisa-bisa dipotong pembagian bon benginnya". Wuah!

Memang banyak alasan dan pembenaran yang harus kita hadapi untuk berani bersepeda ke kantor.

Kesimpulannya adalah hanya orang-orang pemberani yang akan naik sepeda untuk ke kantor, dan..... *Bike to work* memang baik untuk bekerja. Oleh karena itu, marilah kita beramai-ramai menggunakan moda transport yang satu ini sebagai sarana untuk ke kantor.

Bagaimana kalau mulai Jum'at depan, sebagai pengganti senam pagi kita *gowes* sepeda kita ke kantor!



copyright by komunitas pekerja bersepeda Indonesia © 2006

# PASAR KONSTRUKSI ALJAZAIR



Dokumentasi Aljazair

Mengingat hingga saat ini 97 % dari pendapatan nasional Aljazair masih tergantung pada migas, Pemerintah Aljazair memutuskan untuk meningkatkan kapasitas pertanian sebagai upaya diversifikasi ekonomi. Sebesar 3 % pendapatan nasional dari non migas merupakan kontribusi sektor pertanian seperti minyak zaitun, buah korma, berbagai sayuran dan dairy products yang telah mulai diekspor ke negara tetangga.

Untuk mewujudkannya, Menteri SDA Aljazair, Dr. Abdelmalek Sellai mengemban tugas membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan pertanian seperti DAM dan saluran irigasi, selain tugas utama menyediakan air bersih bagi seluruh warga Aljazair.

Pada bulan Juli 2009, Pemerintah dan Parlemen mengeluarkan UU No. 5-12 mengenai pembangunan infrastruktur pengairan. Aturan tersebut memberikan dasar hukum bagi kementerian SDA dalam melaksanakan pembangunan 57 DAM dan saluran irigasi yang tersebar di berbagai wilayah di Aljazair bagian Utara dengan peruntukkan sebagai lahan pertanian, dengan status : proyek pembangunan DAM yang sedang berjalan, proyek pembangunan DAM sedang dalam kajian, proyek penyaluran air bersih yang sedang berjalan.

Dalam kaitan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan DAM dan saluran irigasi tersebut, Pemerintah Aljazair menyambut baik perusahaan konstruksi Indonesia yang berminat untuk berpartisipasi. Sejak tahun 2007, PT Wijaya Karya telah mengerjakan proyek PU jalan bebas hambatan di Aljazair Bagian Timur. Kinerja perusahaan dan tenaga

kerja terampil Indonesia yang bekerja di Aljazair telah diperhitungkan. Masyarakat Aljazair pada umumnya menyambut baik kehadiran warga Indonesia.

Beberapa proyek konstruksi infrastruktur PU dan SDA periode 2010-2014 akan mulai ditawarkan (tender) kepada international bidders di awal tahun 2010. Awal Januari 2009, Menteri PU Aljazair, Dr. Amal Ghoul berkunjung ke Indonesia, dan kemungkinan Menteri PU Indonesia akan membalas kunjungan tersebut di Januari 2010. Kedua belah pihak akan mulai mengimplementasikan butir-butir kesepakatan yang terdapat dalam MoU Kerjasama Bilateral Sektor Infrastruktur PU yang ditandatangani pada waktu kunjungan Menteri PU Aljazair ke Indonesia.

Peningkatan kemampuan kontraktor Indonesia dalam membangun DAM, saluran irigasi, jembatan, jalan raya, bandara, pelabuhan dan proyek-proyek infrastruktur PU lainnya, dalam lingkup nasional maupun internasional, perlu dipetakan untuk diplomasi bisnis PU, khususnya yang akan ditawarkan Pemerintah RI kepada Aljazair, yang memuat business plan maupun company profile dari penyedia jasa konstruksi nasional.

**Penyedia Jasa Konstruksi Nasional menyambut baik kesempatan yang ditawarkan oleh Pemerintah Aljazair.** Departemen Pekerjaan Umum melalui BPKSDM memfasilitasi pihak swasta dengan informasi, diplomasi bisnis dan tenaga kerja yang certificated bagi perwujudan pasar konstruksi bagi penyedia jasa konstruksi nasional. Selain itu BPKSDM membuat Guidelines berisikan pengaturan-pengaturan dan pasar konstruksi di United Arab Emirates (UAE) berupa buku dengan judul Doing Construction Business in United Arab Emirates, sedangkan buku serupa tentang Libya dan Yordan akan terbit di tahun 2010. \*\*\*\* (MH dari Catatan Pertemuan dengan Menteri SDA Aljazair, di Alger tanggal 23 november 2009 dan sumber lainnya).



Dokumentasi Aljazair